

## IMPLEMENTASI PROGRAM SEMBAKO

### IMPLEMENTATION OF “SEBAKO” PROGRAM

Agnes Cellyana Nainggolan<sup>1\*</sup>, Titi Stiawati<sup>2</sup>, Juliannes Cadith<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Magister Administrasi Publik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Jl. Raya Jakarta Km 4 Pakupatan Kota Serang Provinsi Banten

\*Korespondensi: Agnes Cellyana Nainggolan. Email: agnescellyana@gmail.com

(Diterima: 19-06-2021; Ditelaah: 24-06-2021; Disetujui: 28-06-2021)

#### ABSTRACT

Poor people in Indonesia finds difficulties in fulfilling their nutritional food needs. The Ministry of Social Affairs has implemented “sembako” program aimed at reducing the burden of the poor and vulnerable people in fulfilling some main food items. This research aims to describe the implementation of “sembako” program in Lebak Regency, Banten Province. This research regarding the implementation of “sembako” program is based on theory of policy implementation that emphasizes six dimensions, namely standards and objectives, resources, characteristics of implementing agencies, disposition of implementors, interorganizational communication, and economic, social and political conditions. This research uses descriptive-qualitative method. Samples of this research are drawn on purposive and snowball sampling. The collection of data uses interview, observation, literature study, and documentation. The collected data are qualitatively described. Results of this research indicate that the implementation of “sembako” program in Lebak Regency, Banten Province, is not optimally conducted on dimensions of standards and objectives, resources, characteristics of implementing agencies, disposition of implementors, interorganizational communication, and economic, social and political conditions. Some causes are related to the lack of discipline of the local government apparatus, the lack of people’s awareness in completing assistance administration, the lack of inter-implementor coordination and communication, the occurrence of social jealousy because of poor people that do not obtain assistance yet, and the presence of political motives in selecting e-Warong and poor people that obtain assistance.

**Keywords:** Policy Implementation, Public Policy, “Sembako” Program.

#### ABSTRAK

Masyarakat miskin di Indonesia menemui kesulitan untuk memenuhi kebutuhan pangan yang bergizi. Kementerian Sosial mengimplementasikan program sembako yang bertujuan untuk mengurangi beban masyarakat miskin dan rentan dalam pemenuhan sebagian bahan pangan pokok. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan implementasi program sembako di Kabupaten Lebak Provinsi Banten. Penelitian tentang implementasi program sembako ini didasarkan pada teori implementasi kebijakan yang menekankan enam dimensi, yaitu sasaran dan tujuan kebijakan, sumber daya kebijakan, karakteristik agen pelaksana, sikap agen pelaksana, komunikasi antar organisasi pelaksana, serta lingkungan ekonomi sosial dan politik. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-kualitatif. Sampel diambil secara *purposive* dan *snowball*. Pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, studi literatur, dan dokumentasi. Data yang terkumpul dideskripsikan secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program sembako di Kabupaten Lebak Provinsi Banten belum berjalan dengan optimal berdasarkan dimensi sasaran dan tujuan kebijakan, sumber daya kebijakan, karakteristik agen pelaksana, sikap agen pelaksana, komunikasi antar organisasi pelaksana, serta lingkungan ekonomi sosial dan politik. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti kurangnya disiplin aparat pemerintah daerah, kurangnya kesadaran masyarakat dalam melengkapi administrasi pemberian bantuan, kurangnya koordinasi dan komunikasi antar pelaksana, timbulnya kecemburuan sosial karena masih adanya sasaran masyarakat miskin yang belum mendapatkan bantuan, serta adanya unsur politik dalam pemilihan e-Warong dan sasaran masyarakat miskin penerima bantuan.

**Kata kunci:** Implementasi Kebijakan, Program Sembako, Kebijakan Publik.

## PENDAHULUAN

Indonesia masih dilingkupi oleh bayang-bayang kemiskinan. Badan Pusat Statistik (BPS) merilis data kemiskinan pada tahun 2020 berdasarkan Survei Ekonomi Nasional pada September 2020, bahwa persentase penduduk miskin di Indonesia meningkat menjadi 10,9 persen. Kemiskinan di Indonesia semakin menjadi di masa pandemi Covid-19. Pada Agustus 2020, tingkat pengangguran terbuka (TPT) sebesar 7,07 persen, naik 1,84 persen dibandingkan Agustus 2019 sebesar 5,23 persen. Lebih lanjut, sebanyak 29,12 juta penduduk usia kerja atau 14,28 persen terdampak Covid-19 pada Agustus 2020, dengan rincian 2,56 juta penduduk menjadi pengangguran, 0,76 juta penduduk menjadi bukan angkatan kerja, 1,77 juta penduduk sementara tidak bekerja, dan 24,03 juta penduduk bekerja dengan pengurangan jam kerja (*shorter hours*).

Melihat dari tingginya angka kemiskinan di Indonesia, program maupun kebijakan pun dihasilkan oleh pemerintah demi mengentaskan kemiskinan. Salah satu di antaranya adalah program sembako yang merupakan program lanjutan dari Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Pada tahun 2020, program BPNT dikembangkan menjadi program sembako. Transformasi menjadi program sembako dilakukan dalam rangka mewujudkan penguatan perlindungan sosial dan meningkatkan efektivitas program bantuan sosial pangan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Dengan transformasi tersebut diharapkan prinsip 6T dapat lebih tercapai, yaitu tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu, tepat harga, tepat kualitas, dan tepat administrasi.

Program sembako adalah program dimana warga yang terdaftar sebagai KPM dapat menerima bantuan berupa bahan pokok atau uang tunai. Bantuan disalurkan oleh e-Warong desa dan kelurahan setempat. Pada program sembako, indeks bantuan ditingkatkan dan jenis komoditas yang dapat dibeli oleh KPM diperluas tidak hanya berupa beras dan telur seperti

program BPNT. Adanya peningkatan indeks BPNT dari Rp 110.000 menjadi Rp 150.000 per KPM per bulan, dimana tambahan Rp 40.000 per bulan direkomendasikan untuk membeli daging, ikan, ayam, dan kacang-kacangan. Kemudian, karena kondisi pandemi Covid-19, Presiden Joko Widodo menyampaikan arahan bahwa pada bulan Maret 2020 sampai bulan Agustus 2020 besaran jumlah bantuan sembako naik menjadi Rp 200.000 atau bertambah sebesar Rp 50.000. Terhitung hingga bulan Juni 2021, bantuan sembako masih berjumlah Rp 200.000.

Pada implementasi program sembako di Kabupaten Lebak Provinsi Banten, terjadi beberapa polemik yang kemudian mengindikasikan tidak tercapainya tujuan dari program sembako itu sendiri. Terdapat lima permasalahan yang timbul, yaitu: (1) tidak tersalurkannya bantuan dengan tepat sasaran, (2) ketidaksesuaian data KPM, (3) adanya oknum e-Warong dalam pelaksanaan program sembako, (4) keterlambatan turunnya bantuan program sembako, dan (5) jumlah bantuan yang diterima KPM tidak sesuai dengan yang seharusnya.

Berdasarkan gambaran latar belakang tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan implementasi program sembako di Kabupaten Lebak Provinsi Banten.

## MATERI DAN METODE

### Implementasi Kebijakan

Van Meter dan Van Horn (1975: 447) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai tindakan yang dilakukan baik oleh individu atau pejabat atau kelompok pemerintah yang diarahkan pada tercapainya tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Van Meter dan Van Horn (1975: 463), dalam Winarno (2007: 157), Nugroho (2011), Tachjan (2008: 39-40), Agustino (2016), mengemukakan enam dimensi untuk menilai implementasi kebijakan, yaitu:

- 1) Sasaran dan tujuan kebijakan. Sasaran dan tujuan kebijakan mengarah pada penilaian terhadap realisasi pencapaiannya. Sasaran dan tujuan implementasi kebijakan dilihat berdasarkan siapa yang menjadi sasaran kebijakan dan standar dalam mengimplementasikan kebijakan.
- 2) Sumber daya kebijakan. Pelaksanaan kebijakan ditentukan oleh kemampuan untuk memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Sumber daya kebijakan dilihat berdasarkan SDM yang mengimplementasikan kebijakan dan fasilitas yang dibutuhkan untuk mengimplementasikan kebijakan.
- 3) Karakteristik agen pelaksana. Karakteristik agen pelaksana terdiri dari organisasi, norma, dan pola hubungan, baik ciri struktur formal dan informal organisasi, maupun atribut personal. Karakteristik ini menyangkut prosedur kerja standar (mekanisme kerja antar unit-unit organisasi) dan fragmentasi (penyebaran tanggung jawab pada unit-unit organisasi).
- 4) Sikap pelaksana. Sikap pelaksana, dalam arti disposisi, berhubungan dengan kecenderungan pelaksana. Sikap pelaksana mencakup pengetahuan, arah kecenderungan pelaksana terhadap sasaran kebijakan, dan intensitas tanggapan terhadap kebijakan.
- 5) Komunikasi antar organisasi pelaksana. Pelaksanaan kebijakan yang efektif ditentukan oleh komunikasi yang dibangun secara tepat dan konsisten di antara pelaksana kebijakan. Komunikasi antar organisasi dilihat berdasarkan pemahaman terhadap sasaran/tujuan kebijakan dan sosialisasi kebijakan.
- 6) Lingkungan ekonomi sosial dan politik. Lingkungan dimaksud menyangkut lingkungan eksternal organisasi yang ikut mendorong pelaksanaan kebijakan. Lingkungan meliputi dukungan sumber daya, dukungan kelompok kepentingan,

karakteristik partisipan, sifat opini publik, dan dukungan elite politik.

### Metode Penelitian

Fokus penelitian mengacu pada implementasi program sembako di Kabupaten Lebak Provinsi Banten. Informan penelitian berasal dari Dinas Sosial, Desa, Inspektorat, e-Warong, Kecamatan (TKSK) dan Bank Penyalur. Kemudian peneliti mengambil sampel KPM di beberapa desa dengan teknik insidental. Pengambilan sampel sumber data dilakukan secara *purposive* dan *snowball* (Hadi, 1989). Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif (Bogdan & Taylor, 1992; Moleong, 2012), yang ditujukan untuk menjelaskan dan menganalisis fenomena, peristiwa, dinamika sosial, sikap kepercayaan, dan persepsi seseorang tentang kelompok atau sesuatu (Arikunto, 2006; Bahri, 2008; Nawawi & Martini, 1996). Pengumpulan data penelitian menggunakan wawancara, observasi, studi literatur dan dokumentasi (Silalahi, 2009). Analisis data penelitian menggunakan teknik analisis data secara deskriptif (Sugiyono, 2009; Singarimbun & Effendi, 2011).

### HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian tentang implementasi program sembako di Kabupaten Lebak Provinsi Banten dibahas berdasarkan implementasi kebijakan dari Van Meter dan Van Horn (1975), yang menekankan enam dimensi, yaitu sasaran dan tujuan kebijakan, sumber daya kebijakan, karakteristik agen pelaksana, sikap pelaksana, komunikasi antar organisasi pelaksana, dan lingkungan ekonomi sosial dan politik. Hasil penelitian dan pembahasan didasarkan pada enam dimensi tersebut sebagai berikut.

#### Dimensi Sasaran dan Tujuan Kebijakan

Sasaran dan tujuan kebijakan mengarah pada penilaian terhadap realisasi

pencapaiannya. Sasaran dan tujuan implementasi kebijakan dilihat berdasarkan siapa yang menjadi sasaran kebijakan dan standar dalam mengimplementasikan kebijakan.

Kabupaten Lebak dalam mengimplementasikan program sembako mengacu kepada Pedoman Umum Program Sembako 2020. Dalam pelaksanaannya, sasaran dan tujuan program sembako belum tercapai di Kabupaten Lebak. Penelitian ini menemukan fakta bahwa ada keluarga ASN, perangkat desa dan lain-lain yang seharusnya menurut Pedoman Umum Program Sembako tidak boleh menjadi KPM. Hal ini dibenarkan oleh pihak Dinas Sosial, Bank Penyalur dan TKSK, karena seringkali ada data KPM yang luput dari pengawasan karena KPM yang didaftarkan ke DTKS sangatlah banyak mencapai ratusan ribu di seluruh Kabupaten Lebak. Selain itu, sistem SIKS-NG tidak dapat memilah mana keluarga ASN, kepala desa dan lain-lain dan mana yang bukan. Hal ini menjadi sorotan oleh Dinas Sosial, Bank Penyalur dan TKSK agar pihak desa lebih bijaksana dalam memverifikasi dan memvalidasi data KPM di lapangan. Kemudian, ada masyarakat yang seharusnya mendapatkan bantuan program sembako, namun malah tidak mendapatkan bantuan, pada hal ia masuk ke dalam kriteria kemiskinan yang diungkapkan oleh pihak Dinas Sosial, dan juga ada yang tidak mendapatkan bantuan program sembako karena tidak memiliki kelengkapan administrasi berupa e-KTP, KK dan lainnya. Ada pula yang tidak terdata secara *online* atau NIK-nya tidak valid.

Kemudian, untuk ketepatan waktu, ada keluhan dari KPM atas keterlambatan turunnya dana bantuan program sembako. Masyarakat harus mengecek terlebih dahulu apakah dana sudah turun ke rekening masing-masing atau belum. Namun terkadang bantuan yang diterima terlambat selama sebulan. Menurut beberapa KPM, hal ini masih dapat dimaklumi karena belum ada keterlambatan yang berarti, meskipun hal ini berarti tujuan dari tepat waktu yang dimaksud dalam Pedoman

Umum Program Sembako tetap belum tercapai.

Selain itu, penelitian ini juga menemukan adanya ketidaksinkronan antara aturan dan kenyataan di lapangan. Pada Pedoman Umum Program Sembako, dalam Prinsip Pelaksanaan Program poin 3, tertuang bahwa pelaksanaan program sembako harus memenuhi prinsip bahwa e-Warong tidak akan memaketkan bahan pangan, yaitu menjual bahan pangan dengan jenis dan dalam jumlah yang ditentukan sepihak oleh e-Warong atau pihak lain sehingga KPM tidak mempunyai pilihan. Faktanya, melalui wawancara dengan salah satu KPM, penelitian ini menemukan adanya pemaketan yang dilakukan oleh salah satu e-Warong.

Kemudian untuk aspek tepat jumlah, penelitian ini menemukan laporan berupa bukti gesek sebanyak Rp 200.000 di salah satu agen e-Warong di Desa RBT yang diserahkan kepada Kantor Desa RBT, namun adanya pengakuan dari narasumber KPM yang mengatakan bahwa tidak menerima bukti pembelian membuat dua fakta ini menjadi kontradiktif. Dalam aspek tepat harga, pemaketan yang dilakukan oleh e-Warong tidak dapat dipastikan apakah harga komoditas yang diterima oleh KPM sejumlah Rp 200.000 atau kurang dari Rp 200.000.

### **Dimensi Sumber Daya Kebijakan**

Pelaksanaan kebijakan ditentukan oleh kemampuan untuk memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Sumber daya kebijakan dilihat berdasarkan SDM yang mengimplementasikan kebijakan dan fasilitas yang dibutuhkan untuk mengimplementasikan kebijakan. Dalam implementasi program sembako, terdapat tiga sumber daya yang mendukung keberhasilan implementasi program sembako, yaitu sumber daya manusia, waktu dan finansial.

Sumber daya manusia yang diteliti dalam implementasi program sembako di Kabupaten Lebak terdapat Dinas Sosial, Bank Penyalur, TKSK, desa atau kelurahan,

e-Warong atau agen, penyedia dan KPM sebagai pelaksana program sembako. Sumber daya yang ada di dalam implementasi program sembako di Kabupaten Lebak memiliki tugas dan fungsi yang beragam. Seperti sosialisasi dan edukasi, pengumpulan data KPM, verifikasi dan validasi data KPM, pembukaan rekening, pencairan dana dan pemanfaatan dana. Setiap sumber daya sudah mengusahakan tugasnya dengan sebaik mungkin, meskipun pada kenyataannya masih ada hal-hal yang kurang maksimal dalam pelaksanaannya disebabkan oleh satu dan lain hal. Misalnya, untuk Dinas Sosial yang memiliki tugas sosialisasi dan edukasi, di masa pandemi seperti ini Dinas Sosial mengubah metode sosialisasi dan edukasi melalui media sosial, yaitu Instagram. Namun masih ada masyarakat yang mengeluh karena penerima sembako adalah masyarakat miskin yang tidak memiliki akses ke Instagram sehingga mereka tidak mendapatkan informasi. Masyarakat berharap Dinas Sosial mau terjun langsung dan menjelaskan terkait program sembako.

Di sisi lain ada sumber daya finansial dan waktu, dimana untuk waktu Pemerintah Pusat belum memberikan batasan waktu untuk implementasi program sembako, baik di Kabupaten Lebak maupun di daerah lain. Untuk pemanfaatan dana sembako bagi setiap KPM, diberikan waktu setiap bulan sampai akhir bulan, jika lebih dari itu KPM tidak bisa mencairkannya. Pada tahun 2020, rekapitulasi penyebaran sembako adalah sebesar Rp 21.596.800.000 (dua puluh satu milyar lima ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah), dimana 107.984 KPM menerima Rp 200.000 per bulannya.

### **Dimensi Karakteristik Agen Pelaksana**

Karakteristik agen pelaksana terdiri dari organisasi, norma, dan pola hubungan, baik ciri struktur formal dan informal organisasi, maupun atribut personal. Karakteristik ini menyangkut prosedur kerja standar (mekanisme kerja antar unit-unit

organisasi) dan fragmentasi (penyebaran tanggung jawab pada unit-unit organisasi). Dalam pelaksanaannya, keberhasilan implementasi program sembako di Kabupaten Lebak sangat dipengaruhi oleh karakteristik agen pelaksana. Ada usaha-usaha yang dilakukan oleh agen pelaksana, seperti Dinas Sosial yang bekerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mengusahakan pendataan NIK dan pembuatan e-KTP di Baduy luar, karena masyarakat Baduy tidak memahami pembuatan e-KTP, cenderung tidak peduli, sibuk dengan aktivitas masing-masing dan menganggap e-KTP tidak penting, sehingga menghambat pembuatan e-KTP di masyarakat Baduy.

Kemudian usaha lainnya dilakukan oleh mitra atau Bank Penyalur, yaitu BRI. Dalam pelaksanaannya, dana program sembako untuk seratus ribu lebih KPM per bulannya dicairkan oleh BRI berupa saldo sebesar Rp 200.000 ke dalam KKS, sehingga KPM bisa memanfaatkannya di e-Warong terdekat. Kepala Cabang AMPM BRI Lebak, ED mengatakan bahwa BRI Lebak sudah berusaha semaksimal mungkin dalam menyalurkan dana bantuan program sembako kepada masyarakat. Selain itu, BRI Lebak juga berkomitmen untuk mengoptimalkan penunjukan e-Warong, dimana hal ini terkadang menuai polemik di lapangan. Namun, pihak BRI Lebak berusaha untuk mencari solusi agar dapat meminimalisir konflik di lapangan.

Pihak pemerintah daerah berharap masyarakat juga ikut berpartisipasi demi kelancaran implementasi program sembako, karena program sembako tidak bisa berjalan dengan baik apabila masyarakat tidak memiliki karakteristik yang baik untuk menjalankan program sembako. Peran e-Warong juga sangatlah penting karena e-Warong adalah penyalur langsung kepada KPM. Penelitian ini menemukan e-Warong di Kabupaten Lebak yang masih menyalahi aturan, seperti adanya pemaketan komoditas, dimana seharusnya KPM bisa memilih sendiri komoditas apa yang

diperlukan. Kecuali, terkadang ada KPM yang meminta komoditas tertentu dan hal itu dituangkan dalam berita acara yang dilaporkan ke pihak desa.

### **Dimensi Sikap Pelaksana**

Sikap pelaksana, dalam arti disposisi, berhubungan dengan kecenderungan pelaksana. Sikap pelaksana mencakup pengetahuan, arah kecenderungan pelaksana terhadap sasaran kebijakan, dan intensitas tanggapan terhadap kebijakan. Keberhasilan implementasi program sembako di Kabupaten Lebak juga didukung oleh sikap atau kecenderungan para agen pelaksana. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, agen pelaksana memiliki sikap disiplin, karena setiap agen pelaksana memiliki tugas masing-masing yang beragam. Respons implementor terhadap kebijakan pun mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Respons yang baik tentunya berangkat menjadi kemauan bagi para implementor untuk melaksanakan kebijakan publik.

Sikap atau kecenderungan para pelaksana program sembako dalam penelitian ini dilihat dari segi pelaksana, bagaimana sikap pelaksana dalam melaksanakan program sembako. Penelitian ini melihat adanya antusiasme dalam pelaksana program sembako, nampak dari kemauan para pelaksana untuk mengimplementasikan program sembako. Namun ada sisi-sisi yang belum maksimal dalam pelaksanaan program sembako yang disebabkan oleh sikap pelaksana program sembako. Misalnya, sosialisasi yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak melalui Dinas Sosial dirasa kurang oleh masyarakat. Kemudian kurangnya kesigapan masyarakat dalam memenuhi persyaratan yang dibutuhkan untuk menjadi KPM, dan kurangnya kesigapan Pemerintah Daerah dalam membantu masyarakat untuk menjadi KPM. Perbaikan data yang dilakukan secara berkelanjutan, terutama dengan adanya peralihan Menteri membuat masyarakat dan juga pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak harus bekerja lebih keras

untuk memperbaiki data yang ada. Namun hal ini belum didukung oleh sikap pelaksana yang sigap dan disiplin. Contohnya, hingga saat ini terdapat sekitar 2.000 orang Baduy yang belum menerima bantuan karena adanya perubahan sistem pendataan dari *offline* menjadi *online*.

Dinas Sosial menyatakan bahwa masyarakat Baduy luar pernah dibantu oleh Pemerintah Daerah untuk pendataan secara *online* dengan cara turun langsung ke lapangan, namun belum dilanjutkan kembali. Kedisiplinan ini yang masih harus digalakkan pada agen pelaksana program sembako di Kabupaten Lebak. Di sisi lain, pemerintah juga cukup tanggap dalam memangkas e-Warong fiktif, dimana Dinas Sosial dan Bank Penyalur menutup 276 e-Warong yang tidak memiliki kios fisik dan juga merupakan anggota keluarga dari ASN, perangkat desa, TKSK, dan lain-lain. Kemudian, untuk agen pelaksana yang lain, yaitu e-Warong, berdasarkan pengakuan Dinas Sosial dan juga Bank Penyalur, masih ada e-Warong yang tidak disiplin dalam menjalankan tugasnya dan juga penunjukan e-Warong oleh kepala desa dinilai tidak transparan karena seringkali kepala desa mengajukan e-Warong atas dasar politik, entah itu pendukungnya ataupun keluarganya.

### **Dimensi Komunikasi Antar-Organisasi Pelaksana**

Pelaksanaan kebijakan yang efektif ditentukan oleh komunikasi yang dibangun secara tepat dan konsisten di antara pelaksana kebijakan. Komunikasi antar organisasi dilihat berdasarkan pemahaman terhadap sasaran/tujuan kebijakan dan sosialisasi kebijakan. Komunikasi antar-organisasi di dalam implementasi kebijakan/program dimaksud terutama berhubungan dengan koordinasi dan komunikasi yang terjalin di antara pihak-pihak yang terlibat dalam proses implementasi dan menentukan keberhasilan pelaksanaan kebijakan/program.

Berhubungan dengan bagaimana cara mendata KPM, informan dari Dinas Sosial

Kabupaten Lebak mengatakan bahwa dinas menerima data dari desa/kelurahan, dan pihak desa/kelurahan memiliki tugas untuk melakukan verifikasi dan validasi data penerima bantuan sembako. Akan tetapi ketika dikonfirmasi perihal tugas verifikasi dan validasi data kepada Kepala Desa RBT dikatakan bahwa desa/kelurahan tidak melakukan verifikasi dan validasi data tersebut. Selain itu, terungkap bahwa di Desa RBT, data KPM langsung diberikan kepada agen atau e-Warong, baru kemudian pelaporan setiap bulan diserahkan kepada desa/kelurahan. Hal ini tentunya membuat informasi pelaksanaan bantuan sembako menjadi kurang jelas dan koordinasi terkait implementasi program sembako tersebut menjadi tidak sesuai dengan aturan.

### **Dimensi Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik**

Lingkungan ekonomi, sosial dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi biang keladi dari kegagalan implementasi kebijakan/program. Lingkungan dimaksud menyangkut lingkungan eksternal organisasi yang ikut mendorong pelaksanaan kebijakan. Lingkungan meliputi dukungan sumber daya, dukungan kelompok kepentingan, karakteristik partisipan, sifat opini publik, dan dukungan elite politik.

Dari aspek ekonomi, masyarakat menerima dengan baik implementasi program sembako dikarenakan kondisi ekonomi masyarakat Kabupaten Lebak masih banyak yang berada di bawah rata-rata, maka kondisi ekonomi membantu realisasi dari program sembako tersebut. Antusiasme masyarakat dalam menerima bantuan sembako membuat Pemerintah Kabupaten Lebak cukup terbantu dalam menyalurkan bantuan sembako, karena masyarakat tentu tidak akan menolak bantuan dikarenakan kondisi ekonomi yang rendah.

Kemudian dari aspek sosial, masyarakat seringkali mengalami kecemburuan sosial dikarenakan ada masyarakat miskin yang tidak mendapatkan bantuan sembako,

sedangkan masyarakat lainnya mendapat bantuan sembako. Seperti yang dialami oleh masyarakat Kampung DKH, dimana pengajuan untuk mendapatkan bantuan program sembako sebanyak 20 KK tetapi yang diterima hanya 9 KK, dan tahun berikutnya bertambah menjadi 10 KK. Hal ini seringkali berbuah keluhan dan kecemburuan sosial di lingkup masyarakat.

Dari segi politik, terdapat masyarakat yang tidak mendapatkan bantuan sembako dikarenakan tidak mendukung kepala desa pada saat pemilihan kepala desa, pada hal ia layak mendapatkan bantuan. Di samping itu terdapat masyarakat yang terdaftar menjadi KPM akan tetapi mereka merupakan keluarga dari kepala desa, perangkat desa, ASN dan lainnya yang diatur di dalam Pedoman Umum Program Sembako bahwa mereka tidak boleh menerima bantuan, dan mereka ada dalam kondisi ekonomi yang baik atau tidak layak menerima bantuan.

Penunjukan e-Warong yang menyalurkan bantuan sembako masih diliputi oleh faktor politik. Informan penelitian DD mengatakan adanya e-Warong yang dikelola oleh ASN dan perangkat desa di Desa RBT. Hal senada terkait penentuan e-Warong diungkapkan oleh informan penelitian ED, bahwa seringkali e-Warong yang ditunjuk oleh desa berasal dari keluarga sendiri. Untuk mengantisipasi masalah yang terjadi ke depan, Bank Penyalur memilih untuk mendirikan dua e-Warong dimana salah satunya tidak berkaitan dengan kepala desa, ASN dan lain-lain, atau mengganti e-Warong yang terkait dengan ASN, perangkat desa dan lain-lain tersebut menjadi agen BRI Link.

## **KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

### **Kesimpulan**

Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi program sembako di Kabupaten Lebak Provinsi Banten secara umum belum berjalan optimal. Hal ini dapat ditunjukkan berdasarkan enam dimensi implementasi kebijakan sebagai berikut:

- 1) Dalam dimensi sasaran dan tujuan kebijakan, keberhasilan implementasi kebijakan dapat dilihat dari bagaimana standar, sasaran, ukuran hingga tujuan mengapa kebijakan dibuat. Semakin tinggi target tersebut dari kondisi ideal cenderung lebih sulit diimplementasikan, begitu juga sebaliknya. Sasaran program sembako adalah masyarakat miskin, dimana masyarakat miskin masih ada yang belum mendapatkan bantuan. Hal ini menunjukkan masih adanya sasaran yang belum tercapai dari implementasi program sembako.
- 2) Dalam dimensi sumber daya kebijakan, sumber daya implementasi program sembako masih memiliki kekurangan, dimana kedisiplinan SDM belum terlalu digalakkan meskipun kemauannya sudah nampak.
- 3) Dalam dimensi karakteristik agen pelaksana, agen pelaksana dari pemerintah daerah sudah berupaya semaksimal mungkin, tetapi belum ditunjang oleh kesadaran masyarakat dari segi administratif. Bank Penyalur ikut serta menyelesaikan masalah di lapangan terkait penunjukan e-Warong.
- 4) Dalam dimensi sikap pelaksana, pemerintah daerah sudah bersikap cukup baik dalam memangkas e-Warong fiktif. Akan tetapi di sisi lain, kekurang-sigapan juga nampak dari adanya masyarakat yang belum mendapatkan bantuan dengan tepat sasaran karena syarat administratif belum lengkap.
- 5) Dalam dimensi komunikasi antar organisasi pelaksana, masih ditemukan adanya kekeliruan dalam komunikasi dan koordinasi. Hal ini disebabkan oleh masih terjadinya saling lempar tugas dan fungsi organisasi pelaksana pemerintah daerah di lapangan.
- 6) Dalam dimensi lingkungan ekonomi sosial dan politik, lingkungan ekonomi mendukung implementasi program sembako di lapangan karena banyak masyarakat miskin yang menerima bantuan sembako. Kemudian, dari

aspek sosial, terdapat kecemburuan sosial yang nampak di tengah masyarakat karena masih terdapat sasaran kebijakan yang belum mendapatkan bantuan sembako. Terakhir, berkaitan dengan aspek politik, dimana dalam penunjukan e-Warong dan penentuan KPM masih terjadi diskriminasi.

### Rekomendasi

Penelitian ini merekomendasikan beberapa hal terkait implementasi program sembako di Kabupaten Lebak Provinsi Banten, yaitu:

- 1) Pemerintah perlu menggalakkan pengawasan atas segala aspek dalam implementasi program sembako baik di ranah pemerintah daerah maupun di tengah masyarakat sehingga apa yang menjadi potensi permasalahan dapat diantisipasi dengan baik.
- 2) Pemerintah perlu memberi sosialisasi dan edukasi yang baik dan maksimal agar di tengah implementasi tidak ada kesalahan komunikasi antar pihak yang menjalankan program sembako dan juga menghindari kesalahpahaman di sisi masyarakat.
- 3) Pelaksanaan program sembako perlu dievaluasi secara berkelanjutan untuk melihat apakah program sembako ideal untuk dilanjutkan ataukah terlalu muluk dan rumit, karena situasi eksternal dan internal perlu dipertimbangkan.
- 4) Jika dirasakan perlu adanya tindak lanjut terkait penyesuaian implementasi program sembako dengan mempertimbangkan situasi internal dan eksternal, maka pemerintah dapat membuat peraturan turunan untuk implementasi yang lebih ideal.

### DAFTAR PUSTAKA

#### Buku

- Agustino, Leo. (2016). *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. (Edisi Revisi). Bandung: Alfabeta.



- Arikunto, Suharsimi. (2006). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bahri. (2008). *Konsep dan Definisi Konseptual*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Bogdan, Robert & Taylor, Steven J. (1992). *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif*. Terjemahan oleh Arief Rurchan. Surabaya: Usaha Nasional.
- Dunn, William N. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Dye, Thomas R. (2011). *Understanding Public Policy*. New Jersey: Prentice Hall.
- Hadi, Sutrisno. (1989). *Metodologi Research Jilid I dan II*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Moleong, Lexy J. (2012). *Metode Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Chaizi, Nasucha. (2004). *Reformasi Administrasi Publik: Teori dan Praktik*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Nawawi, Hadari & Martini, Murni. (1996). *Penelitian Terapan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Nugroho, Riant. (2011). *Public Policy: Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, Manajemen Kebijakan*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Silalahi, Ulber. (2009). *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Refika Aditama.
- Singarimbun, Masri & Effendi, Sofian. (2011). *Metode Penelitian Survai*. Jakarta: LP3ES
- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tachjan. (2008). *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: Penerbit AIPI Bandung-Puslit KP2W Lembaga Penelitian Universitas Padjajaran.
- Winarno, Budi. (2007). *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Penerbit Media Pressindo.

## Jurnal

- Van Meter, Donald S. & Van Horn, Carl E. (1975). The Policy Implementation Process, A Conceptual Framework. *Administration & Society*, 6(4): 447.

## Dokumen

- Pedoman Umum Sembako Tahun 2020. Kementerian Sosial Republik Indonesia.
- Rekapitulasi Data Sembako Tahun 2019-2020. Dinas Sosial.
- Rekapitulasi DTKS SK Oktober 2020 Kabupaten Lebak. Dinas Sosial.
- Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan 2004. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

## Laman

- Antaranews.com (2020, 25 Februari). Peneliti: Optimalkan Penerapan Program Bantuan Pangan Non-tunai. Diakses pada 5 Januari 2021 dari <https://www.antaraneews.com/berita/1318106/peneliti-optimalkan-penerapan-program-bantuan-pangan-non-tunai>.
- Banten.idntimes.com (2021, 15 Februari). Jumlah Penduduk Miskin di Banten Bertambah 81 Ribu Orang. Diakses pada 25 Februari 2021 dari <https://banten.idntimes.com/news/banten/khaerul-anwar-2/jumlah-penduduk-miskin-di-banten-bertambah-81-ribu-orang/1>.
- cips-indonesia.org (2020, 25 Februari). Implementasi Program BPNT Masih Perlu Dioptimalkan. Diakses pada 5 Januari 2021 dari <https://www.cips-indonesia.org/post/implementasi-program-bpnt-masih-perlu-dioptimalkan>.
- Nasional.kompas.com (2020, 22 Oktober). Pemerintah Percepat Optimalisasi Penyaluran Bansos di Papua dan Papua Barat. Diakses pada 14 Februari 2021 dari <https://nasional.kompas.com/read/2020/10/22/10380611/p>

emerintah-percepat-optimalisasi-penyaluran-bansos-di-papua-dan-papua-barat?page=all.

- Rakyatmerdeka.com (2020, 20 Maret). Program Bantuan Sembako di Lebak Dapat Sorotan Tajam. Diakses pada 12 Desember 2020 dari <https://rakyatmerdeka.com/2020/03/20/program-bantuan-sembako-di-lebak-dapat-sorotan-tajam/>.
- Redaksi24.com (2019, 7 November). Gara-gara Tidak Punya E-KTP, warga miskin di Lebak Tidak Dapat BPNT. Diakses pada 11 Februari 2021 dari <https://www.redaksi24.com/gara-gara-tidak-punya-e-ktp-warga-miskin-di-lebak-tidak-dapat-bpnt/>.
- Republika.co.id (2019, 23 September). BPNT Banyak Masalah, Bulog Minta Jadi Penyalur Tunggal. Diakses pada 12 Desember 2020 dari <https://republika.co.id/berita/py9zh370/bpnt-banyak-masalah-bulog-minta-jadi-penyalur-tunggal>.